**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul **“PENYIAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERHADAP PELESTARIAN PERAHU PINISI SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA”**. Latar belakang penelitian ini adalah Adanya ketimpangan antara amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah kebudayaan yang tercantum dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang belum dirampungkan penyusunan kebijakannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyiapan penyusunan kebijakan Perahu Pinisi sebagai warisan budaya takbenda, hambatan kritis dalam penyusunannya serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan informan Kepala Dinas, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pembuat Perahu Pinisi. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi, dan teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Data Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan fenomena empirik yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan Perahu Pinisi sebagai warisan budaya takbenda belum rampung. Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membatu pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang pendidikan dan kebudayaan yang sekaligus berwenang dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah terkait dengan bidang yang diembannya.

Solusi dari hambatan kritis yang terjadi yakni memberikan sosialisasi, pembinaan atau berupa pelatihan-pelatihan yang mampu membangun pemahaman dan meningkatkan keterampilan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil analisis penulis menyumbangkan beberapa saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yaitu Perlunya mengkaji kembali setiap aturan terkait tugas yang dimanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba selaku Organisasi Perangkat Daerah, menjaga konsistensi dalam melaksanaan pembahasan yang didasari pada perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan percepatan dalam merampungkan perda tentang Pinisi.

**Kata Kunci:**

**Penyusunan Kebijakan, Perahu Pinisi, Warisan Budaya Takbenda**

***ABSTRACT***

*This research entitled* ***"PREPARATION POLICY ARRANGEMENT OF PHINISI BOAT AS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PRESERVATION BY EDUCATION AND CULTURAL DISTRICT OF BULUKUMBA REGENCY"****. The background of this study is the existence of imbalance between the mandate of Law 23 of 2014 on Regional Government, in this case is the culture listed in the obligatory matters that are not related to basic services that have not been finalized its policy formulation by the local government of Bulukumba Regency.*

*This research aims to conceiving the preparation policy arrangement of Pinisi Boat as intangible cultural heritage, critical constraints in composing and solutions to overcome these obstacles. Descriptive qualitative as research method by inductive approach, by informants the Head of Department, Head of Culture and Pinisi Boat Maker. Data Collection Techniques used by interview techniques, observation techniques and documentation techniques. And Qualitative Data Analysis is an analysis technique.*

*Based on the field result of research, the authors obtained the empirical phenomenon that occurred in the Office of Education and Culture Bulukumba District, the authors found the conclusion that the policy of Pinisi Boat as an intangible cultural heritage has not been completed yet. The inhibiting factor is the lack of understanding from the Education and Culture of Bulukumba Regency Office as the Organization of Regional Devices which help the implementation of the government especially in subject of education and culture as well as authorized in preparing the draft of local regulations related to the field.*

*The solution occur of the critical constraints is to provide socialization, coaching or in the form of trainings that are able to build understanding and improve the skills for the Office of Education and Culture as the Organization of Regional Devices.*

*To sum up based on analysis, the author contribute are giving some suggestions to the Office of Education and Culture of Bulukumba Regency which is necassary to review each rule related tasks that are placed to the Office of Education and Culture of Bulukumba District as the Organization of the Region, consistency custody in the implementation of under consideration based on predetermined planning and acceleration for completing the local regulations on Pinisi.*

***Keywords:***

***Policy-making, Pinisi Boat, Intangible Cultural Heritage***